

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGURANGI KEMISKINAN MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SIRNABAYA KABUPATEN KARAWANG

Gina Laelita Sukma

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia

E-mail: ginalaelita354@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang serius ditemukan daerah-daerah terutama di pedesaan, namun Desa Sirnabaya berhasil mengurangi angka kemiskinan di tahun 2018 sebesar 4,5% melalui pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana desa. Penelitian ini menggunakan teori Suhardono yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana peran pemerintah desa sebagai fasilitator, mobilisator dan regulator dalam pembangunan infrastuktur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara dan studi literatur sebagai pengumpulan datanya. Penelitian ini memberikan hasil bahwasannya pemerintah Desa Sirnabaya sangat berperan dan berkontribusi serta selalu berusaha membantu warganya yang terjerat kemiskinan sehingga pemerintahan Desa Sirnabaya di tahun 2022 berhasil menurunkan kembali angka kemiskinan menjadi 10%. Pemerintah Desa Sirnabaya selalu bersinergi dalam berupaya dalam menyejahterakan warganya apalagi jika berurusan dengan infratraktur yang sering digunakan umum, sejauh ini sudah banyak pembangunan infrastruktur yang dibangun pemerintah Desa Sirnabaya ang tentunya berpengaruh terhadap penghasilan warga, salah satunya adalah pembangunan jalan dan pembangunan drainase.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Desa, Kemiskinan, Pembangunan Infrastruktur

ABSTRACT

The problem of poverty is a serious problem found in areas, especially in rural areas, but Sirnabaya Village succeeded in reducing the poverty rate in 2018 by 4.5% through infrastructure development using village funds. This research uses Suhardono's theory which aims to examine and analyze the role of village government as facilitator, mobilizer and regulator in infrastructure development. The method of this research is descriptive qualitative by collecting data through interviews and literature study. The results of the research state that the Sirnabaya Village government plays a very important role and contributes and always tries to help its residents who are trapped in poverty so that the Sirnabaya Village government in 2022 will succeed in reducing the poverty rate again to

10%. The Sirnabaya Village government always works together in efforts to improve the welfare of its citizens, especially when dealing with infrastructure that is often used by the public. So far, the Sirnabay Village government has built a lot of infrastructure development which of course has an impact on the residents' income, one of which is road construction and drainage construction.

Keywords: *Role, Village Government, Poverty, Infrastructure Development*

PENDAHULUAN

Salah satu sarana yang penting di desa adalah infrastruktur yang bermanfaat dan membantu keberlangsungan aktivitas hidup warga suatu daerah terlebih pada suatu desa. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu tugas dari pemerintah desa yang penting untuk dilakukan karena pembangunan infrastruktur selain berdampak pada tampilan fisik desa juga sangat berdampak pada kehidupan masyarakat desa serta berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertama, akses yang baik ke fasilitas Pendidikan dapat membuka peluang Pendidikan yang lebih baik pula pada anak-anak. Kedua, akses jalan transportasi yang lebih baik akan mempermudah aksesibilitas masyarakatnya dalam melakukan aktivitas ekonomi sehari-hari dan membuat peluang ekonomi lainnya menjadi lebih besar. ketiga, infrastruktur Kesehatan yang baik dapat mengurangi angka kematian serta meningkatkan pelayanan Kesehatan yang lebih baik bagi penduduk desa.

Desa Sirnabaya terletak di Kabupaten Karawang dan merupakan salah satu contoh desa yang mengalami

perubahan signifikan dalam kemiskinan di beberapa tahun terakhir. Pemerintah Desa Sirnabaya dalam beberapa tahun terakhir rutin melaksanakan observasi ke rumah-rumah warga dan melakukan observasi ke lapangan yang sekiranya membutuhkan pembangunan atau perbaikan infrastruktur. Sehingga pada tahun 2018 dikutip dari Radar Karawang dan menyatakan bahwa Desa Sirnabaya dengan menggunakan dana desa dalam membangun infrastruktur ternyata mampu dan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masyarakat di Desa Sirnabaya tersebut.

Dalam Teori Suhardono (2016) pemerintah desa memiliki tiga peran yaitu sebagai fasilitator artinya pemerintah desa bertindak sebagai penyedia fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, sebagai mobilisator artinya pemerintah desa sebagai mobilisator memiliki peranan untuk menggerakkan atau mengarahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam mendorong pembangunan demi kepentingan bersama. Ketiga, peran pemerintah desa sebagai regulator artinya pemerintah desa juga harus menyiapkan dan membuat peraturan-peraturan yang tujuannya untuk

efektivitas administrasi pembangunan desa.

Kemudian bagaimana peran pemerintah desa dan apa yang dilakukan lebih lanjut sehingga dapat berhasil menurunkan angka kemiskinan di Desa Sirnabaya menurut Teori Suhardono. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dari dampak pembangunan infrastruktur berkualitas serta peran-peran pemerintah desa dalam mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai rekomendasi untuk desa-desa lain dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan perbedaan pendapatan.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Peran

Peran secara etimologi berarti seseorang melakukan sesuatu atau melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dilakukan memiliki arti penting untuk sebagian orang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:2) peran diartikan sebagai bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan aadalah adegan film, sandiwarra dengan berusaha bermain baik dan secara aktif dibebankan kepadanya. KKBI menyebutkan hal lain bahwa peranan ini memiliki sifat yang mampu menghasilkan dan menggerakkan sesuatu hal yang baik ke dalam sebuah peristiwa.

Menurut (Sarlito,, 2015: 215). “Peran merupakan perpaduan antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi, peran merupakan istilah yang biasanya digunakan dalam dunia teater yang mana seorang aktor harus melakukan dan bermain sebagai tokoh tertentu dan membawakan tokoh tertentu tersebut, dalam hal ini posisi seorang aktor tersebut disamakan dengan posisi seorang masyarakat dan keduanya memiliki posisi yang sama”.

(Meron Raho 2007:67) menegaskan bahwa peran merupakan sikap sifat dan tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari individu yang memiliki status tertentu, dalam hal ini individu tersebut memiliki pengaruh, kekuasaan atau menduduki status sosial tertentu.

Sedangkan menurut Soekanto (2012: 212) arti peran merupakan “aspek yang dinamis kedudukan (status). Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukan peran berdasarkan status yang disandang namun tetap dalam koridor keteraturan berbeda yang menyebabkan peran dari setiap orang berbeda”.

Rivai (2004: 148) menambahkan bahwasannya peran atau peranan adalah suatu tata perilaku yang sering dilakukan individu dan diharapkan oleh masyarakat dalam status tertentu.

Dapat ditarik kesimpulan, peran merupakan seperangkat tingkah laku yang dilakukan oleh setiap orang berdasarkan kedudukan yang diterimanya, serta tingkah laku ini diharapkan oleh orang lain. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran ini dapat berupa tugas atau kewajiban seseorang yang harus dilakukan dalam suatu usaha atau sebuah organisasi.

Pergaulan merupakan salah satu yang berpengaruh dalam peran yang dimiliki oleh seseorang serta pola hidup dan lingkungan hidupnya. Perilaku seseorang dapat diwarnai oleh banyak faktor, seperti persepsi yang berbeda. Tidak dapat dihindari jika kita terlahir dalam keadaan yang berbeda-beda baik dalam arti kebutuhan maupun bagi kategori umum yang semuanya dapat terlihat dari kepribadian masing-masing.

Perbedaan dari setiap individu inilah yang menjadi tantangan tersendiri dan paling berat untuk dihadapi oleh seorang pemimpin, karena disini dapat terlihat kemampuannya dalam menghadapi tantangan perbedaan tersebut. Karena demikian eratnya kaitan antara persepsi seseorang dengan kepribadian dan perilakunya, maka wajib bagi seorang pemimpin untuk memahami pandangan dari bawahannya baik mengenai peranan bawahan tersebut maupun terkait capaian dalam suatu organisasi. Peranan adalah salah satu hal yang dinamis. Jika seseorang

melaksanakan kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan kekuasaannya maka peranan tersebut sudah dilaksanakannya. Menurut Levison dalam Soekanto (2017: 269) peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam suatu masyarakat. Peranan dalam hal ini merupakan suatu peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang segala sesuatu yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi atau Lembaga.
3. Peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat. Perihal fasilitas-fasilitas dalam berperan, lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian dari masyarakat yang yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan.

Peranan yang dimiliki pasti ada tujuannya untuk memiliki hubungan keterkaitan dengan orang-orang yang memiliki peranan yang keterkaitan tersebut serta terdapat aturan, norma, dan nilai-nilai sosial yang dipatuhi oleh orang-orang yang memiliki peranan yang saling terkait tersebut. (Znaniecki dalam Soekanto, 2017: 270) Berdasarkan pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap dan perilaku yang

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki status dan kedudukan tertentu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Peran merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh pihak yang terorganisasi didalam suatu organisasi yang juga melaksanakan fungsinya dalam kehidupan organisasi atau masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas apabila peranan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan administrasi terhadap masyarakat adalah tidak hanya terkait sebagai hak dan kewajiban individu melainkan suatu tugas dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam membantu masyarakat desanya dalam memenuhi setiap kebutuhannya dan mengatasi masalah-masalah yang ada seperti kemiskinan dan pengangguran.

2.1 Pengertian Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintah

Secara umum pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki kekuasaan serta kewenangan untuk membuah dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas tertentu, yang umumnya adalah negara. Pemerintah sendiri terdiri dari Lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah dapat diartikan pula sebagai suatu lembaga yang memiliki kekuasaan atau wewenang dala memimpin suatu wilayah atau daerah dan

mengatur segala sesuatu yang ada didalamnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

Secara garis besar pemerintah dapat artikan dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit pemerintah hanya memiliki satu fungsi yakni legislative tanpa memandang fungsi organ lain. Sedangkan dalam arti luas pemerintah ini dilihat sebagai badan public yang meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan mengupayakan dalam mencapai tujuan suatu negara.

Menurut Sumaryadi (2010: 146), mengemukakan bahwa pemerintah merupakan organisasi yang memiliki:

1. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat
3. Aparatur yang merupakan badan pemerintah yang berfungsi menjalankan kekuasaan
4. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk menangani [erselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sehat.

b. Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 desa

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut des, adalah kesatuan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Widjaja (2010: 53) menambahkan dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “desa merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat Istimewa”.

c. Pengertian Pemerintah Desa

Secara umum pemerintah desa merupakan Lembaga pemerintahan yang terletak di suatu desa dan memiliki tugas untuk mengelola wilayah desa tersebut serta menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa sendiri terdiri dari perangkat desa seperti Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Desa, Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun, atau sebutan lainnya. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam membantu atau memfasilitasi masyarakat salah

satunya dalam mengurangi kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur yang sudah diprogramkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23 ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada p+Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan desa merupakan organisasi penyelenggaraan pemerintah desa yang terdiri atas :

1. Unsur Pimpinan, atau yang sering disebut Kepala Desa
2. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri dari:
 - Sekretariat desa, yaitu staf atau pelayanan desa yang diketuai oleh sekretaris desa
 - Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain
 - Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

d. Peranan Pemerintah Desa

Menurut Suhardono (2016:38) menjelaskan bahwa “peran

merupakan patokan yang membatasi apa yang mesti dilakukan seseorang dalam menduduki jabatan”. Adapun peran pemerintah desa yaitu:

1. Sebagai fasilitator, artinya tindakan pemerintah desa dalam penyedia fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung proses pemerintahan dan pembangunan.
2. Sebagai mobilisator, artinya tindakan pemerintah yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan untuk kepentingan bersama.
3. Sebagai regulator, artinya menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tata tertib administrasi pembanguana).

Kemudian ada peran pemerintah desa menurut (Gito Saputro & Rangga 2015) dalam jurnal “Sinergitas peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang”, yaitu :

1. Sebagai pemecah masalah, artinya pemerintah desa senantiasa membantu masyarakatnya dalam menghadapi masalah-masalah yang ada serta memberika solusi yang dibutuhkan.

2. Sebagai fasilitator, sama halnya menurut Suhardono. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator yang artinya menjadi penyedia fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Sebagai penghubung sistem artinya pemerintah desa menjadi penghubung antara masyarakat desa dengan pihak luar.

4. Sebagai motivator, pemerintah desa juga memiliki peran sebagai pemberi motivasi untuk masyarakatnya agar dapat menjadi pendorong terhadap kemakmuran desanya.

5. Sebagai komunikator, artinya pemerintah desa menyampaikan pesan dan melakukan komunikasi terhadap masyarakat dengan harapan masyarakat mau menerpkan pesan yang disampaikan oleh pemerintah desa.

Dari dua teori tersebut penulis memilih teori peran pemerintah desa dari Suhardono karena penulis anggap teori ini sudah merepretasikan permasalahan yang ada dilapangan terkait dengan pertumbuhan pembangunan yang memiliki dampak terhadap angka kemiskinan di Desa Sirnabaya.

Pengertian Kemiskinan

Levitan (1996) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah kekurangan barang dan pelayanan yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup.

Sedangkan menurut Suparlan pengertian kemiskinan adalah tingkatan hidup yang terletak dibagian paling

bawah dan rendah karena kekurangan materi atau golongan rendah jika dibandingkan dengan golongan lain yang berlaku di masyarakat setempat.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) dan Departemen Sosial mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun nonmakanan).

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan tertentu yang terjadi pada seseorang atau golongan yang kekurangan materi serta tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari yang primer sampai tersier.

Menjadi masalah serius karena kemiskinan adalah salah satu tolak ukur kesejahteraan suatu masyarakat yang berada di suatu daerah tertentu. Kemiskinan juga selalu dijadikan patokan dalam menentukan kemakmuran suatu negara.

1. Jenis Jenis Kemiskinan

- Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh suatu negara. Atau sama dengan suatu keadaan individu yang tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya.
- Kemiskinan relative adalah kemiskinan yang disebabkan

oleh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat.

- Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, baik itu dari nilai-nilai yang diusung, pemikiran mau cara kerja, Contohnya seperti malas dan etos kerja yang rendah.
- Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang berasal dari struktur sosial yang tersemat pada golongan masyarakat tertentu dan memungkinkan terjadinya kondisi di mana mereka tidak dapat menggunakan sumber daya yang sebenarnya dapat digunakan.

Penyebab Terjadinya Kemiskinan

- Kurang tersedia lapangan kerja
- Kurangnya Pendidikan
- Terjadinya konflik atau kerusuhan
- Perubahan iklim atau bencana alam
- Terjadinya ketidakadilan sosial
- Minimnya infrastruktur

Dampak-Dampak Kemiskinan

- Tingginya tingkat kriminalitas
- Tertutupnya akses Pendidikan
- Tingginya tingkat pengangguran

- Pelayanan Kesehatan yang memburuk
- Tingginya angka kematian
- Kekacauan
- Negara dinyatakan pailit

4. Kriteria atau indikator masyarakat yang termasuk ke dalam masyarakat miskin menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013, kategori Atau kriteria miskin termasuk diantaranya : gelandangan, pengemis, perseorangan dari komunitas adat terpencil, Perempuan rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, pekerja migran, dan penderita kejadian ikutan pasca imunisasi. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kriteria masyarakat miskin diantaranya yaitu : luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan, jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester, dan sejumlah kriteria lainnya seperti sumber air minum, bahan bakar memasak, dan sumber penghasilan.

Pengertian Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan secara fisik yang dibangun untuk membantu kesulitan masyarakat yang dapat digunakan secara umum seperti jalan raya, rumah sakit, jembatan, drainase dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur ini dapat tertuju pada hal-hal teknis untuk membantu kegiatan

ekonomi masyarakat dengan cara menyediakan fasilitas transportasi misalnya, perbaikan jalan untuk memudahkan aktivitas ekonomi, distribusi barang dan jasa, dan sebagainya.

Pembangunan infrastruktur ini memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi karena aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat akan terasa mudah jika fasilitas dan sarana infrastruktur yang ada mendukung.

2.2 Penelitian Relevan

- 1) Wini K, Frasinska S, dan Irene M.J.A

Melakukan penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Malitu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Gorontalo”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Malitu belum berperan secara efektif, khususnya pengawasan.

Dalam penelitian ini penulis menemukan persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan observasi.

- 2) Nirwana (2010)

Melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran di Desa Su, rurangi, Kecamatan

Palonbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar”. Hasil dari penelitian ini adalah peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur pasca pemekaran di Desa Su’rulangi belum optimal, hal tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan sarana komunikasi.

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa persamaan yaitu sama-sama menggunakan wawancara sebagai teknik mengumpulkan datanya.

3) Rauf Fauzan (2022)

Melakukan penelitian yang diberi judul “Membandingkan Pengaruh Infrastruktur terhadap Kemiskinan di Kawasan Barat dan Timur Indonesia serta Implikasi Kebijakan”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan infrastruktur berpengaruh menurunkan angka kemiskinan di kedua Kawasan, namun lebih besar pengaruhnya di Kawasan Barat Indonesia.

Dalam judul penelitian ini penulis menemukan beberapa perbedaan yaitu judul tersebut menggunakan metode analisis panel data dengan *Fixed Effect Model (FEM)* sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini tentang peran pemerintah desa dalam mengurangi kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur di Desa Sirnabaya Kabupaten Karawang.

Berangkat dari alur pikir pentingnya peranan pemerintah desa dalam membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup, menyejahterakan warganya melalui berbagai cara salah satunya melalui pembangunan infrastruktur yang lebih mendukung dan menunjang dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat desa. Konsep peran yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti yang diungkapkan oleh Suhardono (2016:38), peranan tersebut mencakup tiga hal, yaitu :

- 1) Fasilitator adalah tindakan pemerintah desa dalam penyedia fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung proses pemerintahan dan pembangunan.
- 2) Mobilisator adalah orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama.
- 3) Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tata tertib administrasi pembangunan)

Dalam kerangka pemikiran ini, mengurangi angka kemiskinan merupakan tugas pemerintah desa yang harus diseriuskan karena sudah menjadi tugas dan fungsi dari pemerintah desa dalam membantu masyarakat dalam memperbaiki taraf hidup. Salah satu caranya adalah

melalui pembangunan infrastruktur yang memadai demi menunjang fasilitas ekonomi untuk masyarakat desa.

METODE

Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Cara ini digunakan dengan observasi dan wawancara serta data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar dan bukan angka. Data dikumpulkan tersebut berasal dari wawancara antara penulis dengan narasumber. Penulis menggunakan metode kualitatif dikarenakan pada metode kualitatif ini berfokus pada pemahaman dan analisi yang lebih mendalam, serta pendeskripsian yang lebih kompleks sehingga metode ini relevan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti yaitu mengenai peran pemerintah desa dalam pertumbuhan pembangunan infrastruktur sehingga berdampak pada angka kemiskinan di Desa Sirnabaya.

“Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian karena ini merupakan langkah dalam mendapatkan data, tentunya dalam pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan” menurut (Sugiyono, 2009:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan Desa Sirnabaya selalu berusaha membantu masyarakatnya dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan

224). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung ke aparat pemerintah Desa Sirnabaya dan studi literatur yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan setelah data dikumpulkan penulis melakukan reduksi data yaitu proses penyederhanaan data atau catatan tertulis dari lapangan sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian, kemudian Penyajian data dilakukan dengan mengelompokan jawaban informan sebagai data temuan yang selanjutnya diolah oleh penulis dan dianalisis, kemudian dilakukan mendisplay data untuk memudahkan penulis dalam memahami, menganalisis dan merepresentasikan data, sehingga jika ada data yang tidak sesuai maka penulis dapat mengedit ulang data sesuai dengan kebutuhan penulis.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Sirnabaya, Jl Menati 1, Sirnabaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361, pada tanggal 13 November 2023 hari senin pukul 11.00 WIB.

kesejahteraan masyarakatnya. Usaha pemerintahan Desa Sirnabaya dalam mengurangi kemiskinan adalah dengan melalui berbagai program seperti pelatihan-pelatihan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan skill dari

masyarakatnya itu sendiri, adanya program bantuan berupa bantuan modal dan BLT, serta program selanjutnya adalah perbaikan-perbaikan infrastruktur yang senantiasa dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonominya, seperti perbaikan jalan dan pembuatan drainase.

Dalam penelitian ini terfokus pada pembangunan program-program infrastruktur Desa Sirnabaya yang didanai dari dana desa dari tahun 2018 sampai tahun 2023 terbukti mampu mengurangi angka kemiskinan di Desa Sirnabaya sebesar 4,5% dan tingkat kesenjangan atau *gini ratio* di Desa Sirnabaya hanya 0,32% (Radar Karawang, 2018).

Program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Desa Sirnabaya banyak yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat alhasil mobilitas perekonomian di Desa Sirnabaya jarang terjadi hambatan.

Beberapa program pembangunan infrastruktur tersebut adalah pembangunan jalan di Kalihurip Desa Sirnabaya yang dimana jalan tersebut sering dilewati oleh masyarakat desa Sirnabaya dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, kemudian ada pembuatan drainase yang bertujuan untuk membantu para petani dalam mengairi sawahnya serta ada pembangunan beberapa jembatan.

Pembangunan infrastruktur seperti yang dibangun di Desa Sirnabaya diantaranya adalah

berupa jalan, drainase, dan jembatan, hal tersebut berhasil membantu mengurangi kemiskinan di Desa Sirnabaya tersebut. Dengan cara infrastruktur jalan yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas ke pasar dan sumber daya, memungkinkan para petani dan produsen lokal untuk menjual barang mereka dengan lebih efisien dan membuka akses ke layanan Kesehatan dan Pendidikan. Drainase yang dibangun dan lebih baik dapat membantu mengurangi risiko banjir dan penyakit terkait air, sementara jembatan dapat memfasilitasi akses-akses ke wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi, membuka peluang ekonomi baru dan akses ke layanan dasar. Dengan demikian program kerja pembangunan-pembangunan infrastruktur tersebut mampu mengurangi angka kemiskinan di Desa Sirnabaya.

Pihak staff Desa Sirnabaya mengafirmaasi bahwasannya pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan sampai tahun 2023 terakhir terbukti berhasil menurunkan kemiskinan sampai sebesar 10%, hal tersebut menjadi semangat tersendiri untuk tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur demi membantu menyejahterakan masyarakatnya.

Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Suhardono menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki beberapa peran sebagai bentuk dari tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintah

desa. Salah satunya adalah pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dimana teori Suhardono ini menekankan bahwa pemerintah desa sebagai fasilitator harus menyediakan sarana dan prasarana, modal, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan keterampilan teknis bagi masyarakat desa serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintahan daerah untuk menyampaikan keluhan-keluhan dari masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini pemerintah Desa Sirnabaya harus senantiasa berperan sebagai fasilitator dalam menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana dalam mengurangi kemiskinan melalui program pembangunan infrastruktur

Aparat pemerintah Desa Sirnabaya selalu berusaha menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk masyarakatnya terutama yang berkaitan dengan perekonomian.

Berdasarkan temuan penulis dari wawancara dengan staff pemerintah Desa Sirnabaya yaitu Ibu Dede dan Ibu Wilda, mereka menuturkan pemerintahan Desa Sirnabaya selalu berusaha menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu contoh peran pemerintah Desa Sirnabaya sebagai fasilitator dalam mengurangi kemiskinan adalah selalu membantu memberdayakan UMKM, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh UMKM tersebut, serta perbaikan-perbaikan jalan yang rusak.

Salah satu program pembangunan infrastruktur yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakatnya adalah perbaikan jalan di daerah Kalihurip Desa Sirnabaya. Perlu diketahui sebelumnya jalan-jalan di daerah Kalihurip masih sangat buruk dan masih berbentuk tanah, “Jalan disana tuh jelek banget sampai saya aja jalan kaki jatuh karena licin jalannya belum di aspal masih tanah gitu” penuturan Ibu Dede (13/11/2023) yang waktu itu melakukan observasi langsung ke lapangan. Sejak observasi tersebut pemerintah desa langsung melaksanakan pembangunan jalan di daerah Kalihurip tersebut.

Pembangun jalan dilaksanakan bersama dengan masyarakatnya yang ikut berpartisipasi karena sangat disambut dengan gembira adanya pembangunan jalan tersebut. Hasil dari pembangunan jalan di daerah Kalihurip tersebut adalah masyarakat yang sering melewati jalan-jalan tersebut sangat terbantu setiap menjalankan aktivitas perekonomiannya.

Sebagai fasilitator pemerintah Desa Sirnabaya membantu mengurangi kemiskinan dengan cara menyediakan dukungan dan fasilitas sarana prasarana bagi masyarakat. Pemerintah Desa Sirnabaya menyediakan akses ke sumber daya dan pasar melalui pembangunan infrastruktur jalan yang baik, yang memungkinkan para petani dan produsen untuk menjual barang mereka dengan lebih efisien. Pemerintah Desa Sirnabaya juga

memfasilitasi pembangunan drainase yang baik untuk mengurangi risiko banjir dan mengurangi peluang gagal panen serta pembangunan jembatan yang dapat membantu memfasilitasi akses ke wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi dan berhasil membuka peluang ekonomi baru.

Peran Pemerintah Desa Sebagai Mobilisator

Dalam teori peran pemerintah desa dari Suhardono (2016) selanjutnya adalah sebagai mobilisator. Peran pemerintah desa sebagai mobilisator artinya adalah pemerintah desa bertindak sebagai penggerak dan pendorong dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, inovasi, pemanfaatan teknologi, dan konsep pemberdayaan yang partisipatif. Peran ini juga melibatkan respon terhadap keluhan masyarakat dan mempercepat perubahan.

Temuan data yang didapatkan oleh peneliti mengenai peran pemerintah desa sebagai mobilisator adalah pemerintah Desa Sirnabaya senantiasa selalu melakukan mobilisasi sumber daya manusia dan sumber daya lokal lainnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berdampak pada pengurangan kemiskinan di tingkat desa.

Pemerintah Desa Sirnabaya selalu mendorong masyarakatnya berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur. Alhasil selama melaksanakan berbagai pembangunan infrastruktur di Desa

Sirnabaya masyarakatnya selalu ikut membantu dan saling gotong royong salah satunya pada saat pembangunan jalan di daerah Kalihurip. Masyarakat Desa Sirnabaya bekerja sama bahu-membahu membangun jalan tersebut demi lancarnya mobilitas perekonomian mereka. Dan dengan gotong royong pembangunan-pembangunan tersebut masyarakat desa dan pemerintah Desa Sirnabaya berhasil mengurangi kemiskinan dari tahun ke tahun.

Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator

Dalam teorinya, Suhardono menjelaskan pemerintah desa berperan sebagai regulator artinya kemampuan pemerintah desa untuk menetapkan arah dan standar yang diperlukan untuk penyelenggaraan pembangunan. Sebagai regulator, pemerintah desa memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pembangunan. Hal ini mencakup penerbitan peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan tujuan untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan guna mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, peran regulator pemerintah desa menjadi krusial dalam menciptakan kerangka kerja yang memadai untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak pada pengurangan kemiskinan di tingkat desa.

Sebagai regulator pemerintah Desa Sirnabaya memiliki tanggung

jawab untuk menyusun kebijakan yang akan menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan supaya pembangunan yang dijalankan dapat berpengaruh besar terhadap kemiskinan di Desa Sirnabaya. Beberapa hal yang pemerintah Desa Sirnabaya lakukan sebagai regulator dalam mengurangi kemiskinan yaitu : membuat peraturan jadwal observasi ke lapangan sebanyak dua kali dalam sebulan dan mengatasi masalah masyarakat seperti kesenjangan akses ke sumber daya, penghilangnya kemampuan masyarakat, dan ketidakpastian dalam pengelolaan kegiatan pembangunan. Dengan melaksanakan peran regulator pemerintah Desa Sirnabaya membantu mengurangi kemiskinan masyarakat desa dengan memastikan kebijakan yang efektif dan adil, serta memantau pembangunan infrastruktur sarana prasana jika terjadi kerusakan atau ada fasilitas umum yang sedang dibutuhkan masyarakat supaya cepat untuk direalisasikan. Hal tersebut efektif mengurangi kemiskinan karena infrastruktur merupakan akses yang dapat mempermudah aktivitas ekonomi.

Pada pemerintahan Desa Sirnabaya sendiri membuat aturan mengenai jadwal observasi ke lapangan langsung, sekiranya ada fasilitas atau infrastruktur yang sudah tidak memadai biasanya akan langsung di proses dan di ajukan untuk melakukan perbaikan. Pemerintah Desa Sirnabaya juga selalu mengatur proses perencanaan pembangunan infrastruktur yang

diawali dengan membuat ajuan kepada sekretaris daerah kemudian pengadaan sumber daya yang biasanya melibatkan masyarakat Desa Sirnabaya sendiri sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan serta pelaksanaan proyeknya yang biasanya pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik tiga kesimpulan :

1. Peran pemerintah Desa Sirnabaya sebagai fasilitator senantiasa menyediakan sarana dan prasarana yang sering digunakan oleh masyarakat desa. Pemerintah desa Sirnabaya juga selalu memfasilitasi masyarakatnya yang melakukan ajuan serta selalu berperan aktif dalam menyediakan fasilitas tersebut.
2. Peran pemerintah desa sebagai mobilisator adalah aparat pemerintah Desa Sirnabay selalu jadi penggerak dan pendorong untuk masyarakat dalam melakukan partisipasi aktif pembangunann infrastruktur.
3. Peran pemerintah desa sebagai regulator, pemerintah Desa Sirnabaya selalu menyusun dan membuat peraturan serta kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Aris. (t.thn.). *Pengertian Kemiskinan: Jenis, Penyebab dan Dampaknya*. Dipetik November Senin , 2023, dari Gramedia Blog: <https://www.gramedia.com/literasi/kemiskinan/>

Dahlan, I. W., Parawangi, A., & Muhiddin, A. (2012). PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAAN (PIIP) DI DESA SENDANA KECAMATAN MAMBI KABUPATEN MAMASA. *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(Vol 2, No 1 (2012)). doi:<https://doi.org/10.26618/oji.p.v2i1.37>

Mat, L., Adiwidjaja, I., & Lestari, A. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Pada Desa Permanu Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang). *Rinjani Unitri*. Diambil kembali dari <https://rinjani.unitri.ac.id/handle/071061/2288>

Mesa, J. B., & Udju, H. R. (2023, Mei). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SOBA RADE DAN DESA PUU MAWO, KABUPATEN SUMBA BARAT (UU NO. 6

TAHUN 2014). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* , 6, 626-630. doi:0.59141/jist.v4i5.621

Mustanir, A., S. F., Adri, K., Nurnawati, A. A., & Goso, G. (2020). Sinergitas Peran Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Sindereng Rappang. *ILmu Pemerintahan*, 1 (2): 84-108 , 86-89. doi:<https://doi.org/10.54144/govsci.v1i2.8>

Nengsri, E., Jamurin, J., & Rahmat, I. (2023). Peranan Pemerintah Nagari dalam Mengatasi Kemiskinan di Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung. *Journal of civic education* , 6(Vol 6 No 2 (2023)). doi:<https://doi.org/10.24036/jce.v6i2.931>

Pangke, R. A., Kumenaung, A. G., & Kalangi, J. B. (2019). EFEKTIVITAS PERANAN DANA DESA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DAN TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SITARO. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*(Vol. 19 No. 03 (2019)), 2-6. Dipetik November Rabu , 2023, dari

- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/25257>
- Rosbin. (2018). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN: STUDI DI KOTA YOGYAKARTA DAN MALANG. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 23, 131-135. Dipetik November Rabu, 2023, dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1878/886>
- Simbolon, D. S., Sari, J., Yowisa Yolanda Purba, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021, Desember). PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR. *Jurnal Kewarganegaraan*, 295-301. Dipetik November Rabu, 2023, dari <https://pdfs.semanticscholar.org/1488/bf097c4c84f03c05fa9d7eab4f9b8190f0fb.pdf>